**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERS YANG
MENYEBARKAN IDENTITAS TERSANGKA SECARA
BEBAS DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA
TAK BERSALAH**

Oleh : Livita Khairinnisa

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat : Jalan Rambai, Nomor 140, Panam, Pekanbaru

Email : Livita48@gmail.com Telepon : -

ABSTRACT

Criminal acts committed by the press in the form of spreading the identity of the suspect freely are basically acts committed by press companies and/or journalists as well as editors, at every level who carry out their duties and functions and can represent corporations, which can result in criminal liability. Both the corporation and together with their employees personally, can be held criminally responsible. The mode of disseminating the identity of the suspect exists in various forms. The reason and the purpose of the press to disseminate the identity of suspects is to maximize profits and survive from global competition, as well as the lack of strict regulation on the press that spreads the identity of suspects freely, the lack of punishment for press perpetrators is also the reason for repeated mistakes. This press crime is regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the press.

This research uses a typology of normative legal research or also known as doctrinal legal research, which specifically discusses legal principles. In this study, the author uses a descriptive research, because the author describes criminal liability for the press that spreads the identity of the suspect freely linked to the principle of the presumption of innocence.

The results of the research conducted by the author are, the press must be held criminally responsible because the press as the maker and at the same time is responsible for the profits obtained by the press or the losses suffered by the victims can be so large and the crime of spreading the identity of the suspect freely by the press has the main motive is in the interests of the press itself and can be a source of other crimes. Judges should in imposing sanctions on the press be subject to criminal penalties as regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the press, Articles 483 and 484 of the Criminal Code. In the sentencing, there are various obstacles, including the fines given to the crime of spreading the identity of the suspect and contrary to the principle of presumption of innocence which is considered not in accordance with the consequences.

Keywords: Liability–Identity of the Suspect –Presumption of Innocence

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pers berperan sangat penting untuk pemerintahan yang demokratis. Pers memiliki informasi dan pertanggungjawaban hukum atas informasi yang mereka siarkan, karena kebanyakan orang mendapatkan informasi melalui media.¹ Informasi yang akurat memerlukan proses pencarian yang panjang, mulai dari pencarian berita, pemberitahuan oleh informan, wawancara pada narasumber, proses penulisan berita, editing, hingga beredarnya berita yang dapat dinikmati masyarakat.

Makna pers pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yakni "Pers adalah lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dalam bentuk media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia".² Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Pers, ditentukan bahwa fungsi dari pers adalah sebagai fungsi media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi. perusahaan pers diselenggarakan berdasarkan prinsip ekonomi. Selain

fungsi tersebut diatas, pers memiliki fungsi sebagai pers yang bertanggung jawab.

Praduga Tak bersalah merupakan terjemahan: *Presumption of innocence*, adalah asas pemidanaan yang menjadi salah satu tiang utama menjamin orang terhindar dari anggapan telah bersalah bahkan telah dipidana sebelum majelis hakim menetapkan putusan.³ Asas praduga tak bersalah dalam pers, berakar dari asas praduga tak bersalah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam pemberitaannya, media massa berjalan dengan pedoman etika profesional. Wartawan seharusnya mampu bertindak memenuhi kewajiban dan bertindak berdasarkan kode etik yang mengacu pada norma sosial.⁴

Contoh kasus yang menarik perhatian publik yaitu kasus seorang polisi atas tuduhan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Anggota Polsekta Tamalate, Brigadir Polisi (Brigpol) Arifuddin Nanu diancam Pasal berlapis tentang undang-undang perlindungan anak dan percobaan pemerkosaan. Selain itu, Arifuddin juga akan dikenakan sanksi disiplin, menurut Mantasiah, Arifuddin bahkan terancam dipecat sebagai anggota polri. Hal ini tentu sangat meresahkan bagi pelaku dan keluarga pelaku, dikarenakan

³ Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, 2016, hlm. 64-65.

⁴ Afridah, "Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 No. 1, Mei 2014, hlm.2

terdapat pula hukuman moral yang akan di terima oleh pelaku dan keluarga pelaku, sehingga akibat dari penulisan identitas yang tidak menggunakan inisial akan berdampak besar dan melanggar Undang-undang Pers terkait dengan asas praduga tak bersalah.⁵

Dalam penerapan delik pers di Indonesia, majelis Hakim dalam berbagai tingkat pengadilan menggunakan berbagai penafsiran yang berbeda tentang penerapan Undang-undang Pers sebagai *lex specialis*. Berbagai putusan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang meneguhkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis* dari peraturan perundang-undangan yang lain.⁶

Berdasarkan kasus diatas penulis tertarik melakukan analisis yuridis terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang menyebarkan identitas tersangka secara bebas dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah, penulis juga menemukan beberapa tulisan yang bertema mirip dengan yang akan diangkat oleh penulis sebagai berikut : *State of the Art* penelitian sebelumnya berfungsi untuk analisa dan memperkaya pembahasan penelitian, serta membedakannya

⁵ Kompas.com, "Perkosa Anak di Bawah Umur, Polisi Diancam Pasal Berlapis", <https://regional.kompas.com/read/2014/05/23/1937030/Perkosa.Anak.di.Bawah.Umur.Polisi.Diancam.Pasal.Berlapis>, diakses 23 Januari 2020

⁶ Riris Nova Uli, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemberitaan Pers yang menghakimi Tersangka Pidana dalam kaitannya dengan Asas Praduga tak Bersalah", *Skripsi*, Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2012, hlm.12.

dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pers yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Koran (Oleh : Wulan Ratna Sari dari Universitas Riau berbentuk Skripsi tahun 2018). Skripsi ini membahas bagaimana pertanggungjawaban pers yang dikaitkan dengan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 310 dan 311 tentang menista dan menfitnah atau pencemaran nama baik terhadap pers melalui koran.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul "***Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pers yang Menyebarkan Identitas Tersangka Secara Bebas Dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah***".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang menyebarkan identitas tersangka secara bebas dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah?
2. Siapakah pihak yang bertanggungjawab terhadap pers yang menyebarkan identitas tersangka secara bebas dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang menyebarkan identitas tersangka secara bebas yang

dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah.

- b. Untuk mengetahui siapa saja pihak yang bertanggungjawab terhadap pers yang menyebarkan identitas secara bebas kaitannya dengan asas praduga tak bersalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana, khususnya dalam pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana suap.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Teori Kebebasan Pers

Suatu karya klasik dalam bidang teori pers selama ini, yaitu *Four Theory of the Press*, yaitu Teori Sistem Otoriter, Teori Libertarian, Teori Tanggungjawab Sosial, dan

Teori Komunis. Telah menciptakan paradigma dominan dalam menganalisis sistem-sistem media di dunia. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Sosial.⁷ Teori pers yang pertama adalah teori pers otoriter atau teori otoritarian. Menurut teori ini pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdikan kepada negara. Pada teori pers seperti ini, pers tidak boleh mengkritik alat negara dan penguasa.⁸

Social Responsibility Theory (Teori Pers Pertanggungjawaban Sosial) Teori pers pertanggungjawaban sosial merupakan teori baru yang muncul untuk mengatasi terlalu derasnya penganut teori pers sebelumnya.⁹ Konsep pertanggungjawaban sosial pers telah mendapatkan pengakuan global selama lebih dari 5 dasawarsa terakhir, konsep yang didorong secara teoritis oleh hasil komisi kebebasan pers di Amerika pada tahun 1947 adalah hasil dari pemikiran kritis dan antitesa dari konsep dan praktek sistem pers *libertarian* yang dipublikasikan oleh Ferd Sieberd dan teman temannya melalui buku yang berjudul "*Four Theory of the perss*". Dengan landasan filosofi dan latar belakang sejarah yang berbeda, cita-cita ideal dari pertanggungjawaban sosial pers

⁷ Ilya Revianti Sudjono Sunarwinandi, "Budaya Sensor-Diri dalam Kebebasan Pers di Jepang", *Makara*, Sosial Humaniora, Vol.10 No.1, 1 juni 2006, hlm.18

⁸<https://kumparan.com/mediamadura/sistem-teori-dan-orientasi-pers> diakses pada 10 Oktober 2021 pukul 23.41

⁹ *Ibid.*

di Indonesia sama dengan konsep yang bersumber dari komisi kebebasan pers Amerika tersebut.¹⁰

Mulai sejak era reformasi, yang pada saat itu sistem politik Indonesia mulai menggunakan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, maka sejak saat itulah pers di Indonesia mulai menganut teori pers pertanggungjawaban sosial atau kebebasan pers yang bertanggungjawab kepada publik atau kepentingan umum. Teori pertanggungjawaban sosial mempunyai asumsi utama, bahwa kebebasan pers mutlak, banyak mendorong terjadinya dekadensi moral. Oleh karena itu, teori ini memandang perlu adanya pers dan sistem jurnalistik yang menggunakan dasar moral dan etika.¹¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan keadilan.¹² Pertanggungjawaban pidana adalah

suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.¹³

Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁵

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum; Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderrechteljkheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk

¹⁰ Rendra Permana, "Tinjauan Kritis Konsep dan Aplikasi Teori Pertanggungjawaban Sosial Pers di Dunia Pers Indonesia", *Sosiohumaniora*, Sosiohumaniora, Vol.7 No.3, November 2005, hlm.273

¹¹ Anggraini Rati, "Etika Wartawan dalam Peliputan Berita Kriminal di Inewstv Sumatra Selatan", *Skripsi*, Fakultas Dakwan dan Komunikasi, Palembang, 2016, hlm.20.

¹² Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.16

¹³ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.33

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ hairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.¹⁷
2. Definisi terminologinya ialah media massa cetak disingkat media cetak. Istilah pers sudah lazim diartikan sebagai surat kabar (*news paper*) atau majalah (*magazine*) sering pula dimasukkan pengertian wartawan di dalamnya.¹⁸
3. Identitas berasal dari kata *identity* yang artinya memiliki tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok atau suatu yang membedakannya dengan yang lain.¹⁹
4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana.²⁰
5. Asas praduga tak bersalah adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, cetakan pertama, Jakarta, hlm.33

¹⁸ A.muis, *Kontroversi Sekitar Keberadaan Pers: Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers*, Mario Grafika, cetakan pertama, Jakarta, hlm. 11-12

¹⁹ Winarto, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 9-10

²⁰ Y.B. Suharto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2008, Jakarta, hlm.280

dihadapkan di muka persidangan, wajib dianggap tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.²¹

3. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normative yaitu penelitian hukum kepastakaan.²³ Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepastakaan. Nama penelitian kepastakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.²⁴

2. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif ini, sumber datanya adalah data sekunder, yang diperoleh peneliti dari berbagai kepastakaan serta peraturan perundang-undangan,

²¹ Tolib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, (Malang: Setara Press, 2014) hlm.23

²² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.23.

²⁴ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 19.

yurisprudensi, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
5. Kode Etik Wartawan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks komulatif, dan lainnya.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian

kepustakaan atas studi dokumenter. Peneliti yang hendaknya melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik yang jenis berlainan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku, literatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁷

4. Analisis Data

Teknis analisis bahan hukum dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya dilakukan analisis kualitatif yang merupakan data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika atau pun yang sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan juga menggunakan analisis deskripsi (*descriptive analysis*) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif,

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.103.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.50.

²⁷ Aslim Rasyad. *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.6

adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang berlaku.²⁸

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pers dan Kebebasan Pers

Istilah pers atau *Press* berasal dari istilah latin *Pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat.²⁹ Sistem pers yang otoriter cenderung melahirkan pers yang otoriter juga, demikian juga sistem politik yang demokratis akan melahirkan pers yang bebas (kebebasan pers).

Sebuah demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya pers yang bebas dan kebebasan pers tidak akan tercapai tanpa sistem yang demokratis. Di Indonesia kebebasan pers memiliki landasan hukum diantaranya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pers 1999, Undang-Undang Penyiaran 2002 dan lain-lain.³⁰ Kebebasan ini menunjuk tidak adanya campur tangan Negara atau pemerintah maupun elemen masyarakat lain, baik individu maupun kolektif dalam memberikan informasi kepada publik, dan secara konstitusional

keberadaannya dilindungi oleh negara.³¹

Pengertian Pers sebagaimana disebut dalam *Black's Law Dictionary* adalah "*The Aggregate of Publications issuing from the press, or the giving publicity to one's sentiments and opinion through the medium of printing; as in the phrase "liberty of the press" freedom of the press is guaranteed by the first amendment*".³² Berdasarkan pendapat ML. Gandhi menjelaskan pengertian pers Indonesia dipengaruhi oleh proses pembangunan Indonesia. Kedudukan pers mengikuti perkembangan pembangunan bangsa Indonesia yang dimulai sejak zaman penjajahan yang mendorong terbentuk pers Nasional.³³

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut "pertanggungjawaban pidana", sedangkan Moeljatno mengatakan "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai

³¹ *Ibid.*

³² St Paul Minn, *Black's Law Dictionary with pronounciations, six edition*, USA publishing, co, 1984, hlm. 1185, dalam Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Cetakan I, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2006, hlm.34

³³ Tri Hartomo, "Perbandingan Sistem Pers yang Dianut Indonesia di Era Orde Baru dan Orde Lama (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Hukum, 2012, hlm.15

²⁸ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 20-21.

²⁹ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011, hlm 35

³⁰ Rahmi Rahmi, "Kebebasan Pers dan Komunikasi di Indonesia", *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, Vol. 6 nomor 1 tahun 2019

“pertanggungjawaban pidana”.³⁴ Literatur yang ada belum memadai dalam membantu masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi dan praktisi, dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana beserta perkembangan dan penerapannya.³⁵ Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan di mana pembuat sudah dapat dipidana apabila pembuat telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batin si pembuat.

Penulis dalam menjelaskan *strict liability* menganalisis penggunaan *strict liability* dalam kasus perdata dan kasus pidana. Kasus perdata yang populer dalam penerapan *strict liability* adalah kasus Ryland melawan Fletcher yang diputus oleh hakim Blackburn. Kasus Prince, kasus Werner melawan Metropolitan *Police Commissioners* (1969) dan kasus Alphacell Ltd melawan Woodward (1972) adalah kasus-kasus yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan penerapan *strict liability* dalam perkara pidana. *Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.³⁶

Pertanggungjawaban atau dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word “liability” for the*

situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tak Bersalah

Pengertian asas praduga tak bersalah ialah pemikiran atau prinsip yang menganggap bahwa seseorang belum dinyatakan bersalah terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukannya telah melanggar norma dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.³⁸ Pada dasarnya, problematic penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana ini, berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka atau terdakwa dengan aparat hokum yang berkepentingan, sehingga dikawatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum.³⁹

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam pasal tersebut seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum mendapat putusan pengadilan yang *incracht* (berkekuatan hukum tetap) dalam artian yaitu tidak adanya ataupun tidak melakukan upaya hukum biasa yang dilakukan terdakwa terhadap putusan pengadilan tersebut.⁴⁰

³⁴ Sampur Dongan Simmamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana dalam Bagan*, Fakultas Hukum Untan Press, Pontianak, 2015, hlm.166

³⁵ Nella Sumika Putri, “Risensi Buku, Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.2 nomor 1 tahun 2017, hlm.132

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.65

³⁸ Sirman Dahwal, “Studi Tentang Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Kutei, Universitas Bengkulu*, 2016, hlm.4

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Paulus Hadisuprpto, “Peradilan Anak Restoratif; Prospek Hukum Pidana

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia. Penggunaan asas praduga tak bersalah pada bidang praktek pers diartikan dalam pemaknaan yang berbeda-beda dari asas praduga tak bersalah dalam pemaknaan secara hukum.⁴¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pers yang Menyebarkan Identitas Tersangka Secara Bebas dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan

Anak Indonesia”, *Yuridika*, Vol. 24, Nomor 2, Mei-Agustus, 2009, hlm.107

⁴¹ *Ibid.*

pembinaan para penegak hukum.⁴² Seseorang dapat dipermasalahkan melanggar suatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana walaupun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat.⁴³

Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik menjadi pedoman bagi insan pers dalam melaksanakan tugas menyiarkan dan pertanggungjawaban berita yang di publikasikan. Kinerja pers telah memperoleh legitimasi pengaturannya yaitu dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁴⁴ Undang-undang Pers pada kenyataannya masih belum dapat memberikan kepastian hukum bagi pers itu sendiri maupun bagi masyarakat di sekitar insan pers. Penegak hukum seperti hakim, penyidik, dan kejaksaan menganggap bahwa Undang-undang Pers terlalu luas sehingga menimbulkan celah yang digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan KUHP sebagai *lex generalis*.

Peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak

⁴² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

⁴³ Eddy Rifai, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pers”, *Tesis*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.54

⁴⁴ Gading Tian Mada, “Menyembunyikan Identitas Pelaku Tindak Pidana oleh Insan Pers Menurut KUHP dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari – Juni 2014, hlm. 112

relevan dikatakan *lex specialis* ketika ternyata undang-undang yang dinyatakan *lex specialis* itu tidak mampu untuk menjawab konflik hukum yang terjadi, perlu kiranya dianalisis, apakah Undang-undang Pers termasuk *lex specialis* atau tidak.⁴⁵ Pada dasarnya Undang-undang Pers telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai *lex specialis* karena kegiatan jurnalistik merupakan suatu hal yang khusus. Keberadaan Undang-undang Pers ini telah mengatur kegiatan atau aktivitas jurnalistik itu secara khusus pula.

Dan Undang-undang Pers itu telah mengadopsi seperangkat kinerja jurnalistik seperti objektivitas dan keakuratan, keseimbangan dalam memberitakan kebenaran dan sebagainya. Demikian pula dalam hal penyelesaian hasil kerja profesional sebagaimana terefleksikan pada hak jawab, hak koreksi, dan kewajiban koreksi termasuk hak tolak. Namun, *lex specialis* tidak hanya berada pada ranah etika. Tetapi etika itu harus tundak kepada hukum manakala permasalahannya tidak dapat diselesaikan berdasarkan pedoman etika. Konkretnya pada saat muncul penilaian masyarakat bahwa telah terjadi arogansi pers, dalam bahasa etika pers melaksanakan kinerjanya dengan tidak profesional dan melampaui batasan-batasan hukum yang berlaku.⁴⁶

⁴⁵Akbar Tri Dermansyah, "Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers", *Artikel Ilmiah*, Universitas Barawijaya, 2015, hlm. 16

⁴⁶*Ibid.*

Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu jenis HAM yang dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Bahkan asas hukum ini diadopsi oleh pers melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam praktek pers bukanlah merupakan tindakan yang berlebihan terhadap seorang tersangka/terdakwa, akan tetapi asas ini tetap diperlukan untuk menghindari adanya *trial by the press* sehingga pers nasional benar-benar mampu menghasilkan pemberitaan-pemberitaan yang berimbang dan bersifat tidak memihak.⁴⁷

B. Pihak yang Bertanggungjawab Terhadap Pers yang Menyebarkan Identitas Tersangka Secara Bebas Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari perbuatan pidana. Seseorang harus dikatakan melakukan tindak pidana maka ia baru bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatannya tersebut telah terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan pidana yang berlaku.

⁴⁷

<https://www.neliti.com/publications/29381/perspektif-ham-mengenai-penerapan-asas-praduga-tidak-bersalah-dalam-kaitannya-de> diakses pada 10 Oktober 2021 pukul 22.05

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.⁴⁸

Perbuatan pidana tidak selalu dijatuhi hukuman pidana meskipun seseorang telah terbukti melakukan perbuatan pidana. Hal ini dikarenakan adanya pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya melihat peruatannya saja melainkan melihat unsur-unsur kesalahannya juga. Apakah arti kesalahan itu, kesalahan merupakan salah satu faktor yang dapat dipidana dalam suatu perbuatan pidana. Menurut Simon kesalahan adalah keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan ada hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan demikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁴⁹

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Moelyatno, 1983, hlm.158 dalam Eddy Rifai, *Pertanggungjawaban Pidana dalam TP Pers*, hlm.55

kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*); maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP; perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Unsur *wederrechtelijk* selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijkpraak* atau pembebasan.⁵⁰

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang menyebarkan identitas tersangak secara bebas

⁵⁰ *Ibid.*

kaitkannya dengan asas praduga tak bersalah, dimana pertanggungjawaban pidana dapat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam menangani perkara pers dapat pula digunakan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam hal ini pers dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila terbukti telah melakukan unsur-unsur yang melanggar norma kesusilaan, pelanggaran kode etik jurnalistik dalam peliputan atau pemberitaan suatu informasi serta menyebarkan identitas tersangka secara bebas yang belum ditetapkan sebagai pelaku kejahatan oleh pihak penegak hukum sesuai dengan asas praduga tak bersalah.

2. Pihak yang bertanggungjawab terhadap pers yang menyebarkan identitas tersangka secara bebas kaitannya dengan asas praduga tak bersalah yang mana pihak dari lembaga pers itu sendiri saling keterkaitan antara satu sama lain. Dalam menentukan subjek hukum tindak pidananya adalah dengan melihat kepada Pasal 18 ayat (2) dan pada ketentuan ini juga terdapat pada Pasal 13 Undang-undang Pers yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan pers tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana yang dimaksud

dalam penjelasan Pasal 12 Undang-undang Pers. maka pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban korporasi yang diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi.

B.Saran

1. Dalam hal ini kepada pemerintah melalui lembaga berwenang untuk dapat melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan memasukkan pasal mengenai larangan mempublikasikan identitas tersangka tindak pidana, dan diberikannya hukuman yang setimpal dikarenakan pemulihan nama baik yang membutuhkan waktu tidak singkat akibat dipublikasikannya identitas tersangka apabila apalagi tersangka tersebut masih dalam proses penyidikan, dan Dewan Pers harus lebih tegas dalam pemberitaan publikasi identitas korban tindak pidana.
2. Untuk kalangan insan Pers, seperti Jurnalis dan Perusahaan Pers, harus mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap pemberitaan dalam hal publikasi identitas tersangka tindak pidana. Karena kebenaran atau fakta yang belum ditetapkan terhadap suatu permasalahan akan menggiring opini publik yang buruk terhadap tersangka atau pelaku,

sebaiknya jika belum ditetapkan, maka disampaikanlah sesuai fakta yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmakusumah, 1981, *Kebebasan Pers dan Informasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2006, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sadono, 2006, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta.
- Chazawi, Adami, Prija Djatmika, Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Pers (Penyerangan Dengan Mempublikasikan Tulisan)*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hanafi dan mahrus, Cetakan Pertama, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan*

Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.

Hertini, Mega Fitri, Sampur Dongan Simmamora, 2015, *Hukum Pidana dalam Bagan*, Fakultas Hukum Untan Press, Pontianak.

H.R Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hiarij, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

- Acan Mahdi, "Kebebasan Pers dan Publik", hlm. 20-21
- Afridah, 2014, "Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap

- Perempuan”, *Jurnal Krimonologi*, Vol. 10 No. 1, Mei
- Akbar Tri Demansyah, 2015, “Pertanggungjawaban Pidana Pers yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Praktik Sejarah Hukum Pers”, *Artikel Ilmiah*, Universitas Barawijaya.
- Alberth Simanjuntak, “Kriminalisasi Pers Atas Publikasi Terhadap Identitas Korban Tindak Pidana”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau.
- Anggraini Rati, 2016, “Etika Wartawan dalam Peliputan Berita di Inewstv Sumatra Selatan”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Palembang, 13 Desember.
- Bambang Sutrisno, 2014, “Pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Tersangka Korupsi dalam Pemberitaan Media Massa”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 21 Juli.
- Chairul Huda, 2010, “Makna Asas Praduga tak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktik Pers”, *Jurnal Dewan Pers*, Edisi No 2, April
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- C. Peraturan undang-undang**
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Kode Etik Profesi Wartawan
- D. Website**
- <https://regional.kompas.com/read/2014/05/23/1937030/Perkosa.Anak.di.Bawah.Umur.Polisi.Diancam.Pasal.Berlapis>, Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2020.
- <https://aji.or.id/read/kode-etik.html>, Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2020.
- <https://anggiyoghazone.wordpress.com/fungsi-pers/>, Diakses Pada Tanggal 1 Mei 2020
- <https://www.vidio.com/watch/412607-enam-plus-menurut-saksi-pembunuh-mirna-pintar>, diakses 26 Juli 2020
- <http://global.liputan6.com/read/2573847/melacak-masa-lalu-jesicca-terdakwa-kasus-kopianida-di-australia?siteName=liputan6>, diakses 26 Juli 2020.